



Kunjungan wisatawan di pantai-pantai kian marak kembali, seperti di Pantai Kukup Gunungkidul. Banyaknya kunjungan wisata mampu menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

KR-Dedi EW

BLANGKO KTP-EL SUDAH TERSEDIA

Warga Diminta Tukarkan Surat Keterangan

WONOSARI (KR) - Blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik (KTP-EL) di Kabupaten Gunungkidul dipastikan sudah kembali tersedia. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kini sudah bisa melayani pencetakan KTP-EL secara fisik. Kepala Disdukcapil Gunungkidul, Markus Tri Munarja mengatakan blangko KTP-EL kembali tersedia sejak awal Januari 2023 lalu sehingga sudah tidak ada masalah terkait dengan ketersediaan kartu. "Blangko yang tersedia sudah cukup untuk melayani seluruh pemohon," katanya Senin (23/1).

Setelah adanya blangko KTP-EL, pemilik Surat Keterangan (Suket) kini bisa menggantinya dengan KTP-EL fisik dengan lebih dahulu mengajukan permohonan.

Pengajuannya bisa lewat kantor kapanewon atau langsung ke Kantor Disdukcapil Gunungkidul.

Karena itu pahalnya mengimbau agar warga pemilik suket segera menukarkannya dengan KTP-EL fisik. Apalagi suket tersebut memiliki masa berlaku terbatas. Pihaknya saat ini juga tengah menanti realisasi Informasi Kependudukan Digital (IKD) yang rencananya akan mulai diberlakukan tahun ini. "Nanti pada tahap awal sebesar 25 persen penduduk akan diberikan IKD," ucapnya.

Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinasi Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Anton Wibowo menyebut kekosongan tersebut tidak hanya terjadi di Gunungkidul juga dialami banyak daerah di Indonesia. Dengan begitu diharapkan nantinya persoalan yang berkaitan dengan KTP-EL sudah tidak ada masalah lagi. "Jadi tidak hanya Gunungkidul yang mengalami kekosongan blangko KTP-EL," jelas Anton beberapa waktu lalu. (Bmp)

PLHUT Optimalisasikan Pelayanan

PENGASIH (KR) - Pembangunan gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kankemenag Kulonprogo awal tahun 2023 ini mulai diproses. Diharapkan nantinya bisa segera dimanfaatkan untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

"Pelaksanaan pembangunan agar tepat mutu, waktu, dan kualitas. Jangan segan memberikan sanksi kepada penyedia barang/jasa jika terlambat dalam pelaksanaan. Jika ada persoalan agar dikomunikasikan dengan Irjen seawal mungkin, sehingga bisa mengawal memberikan solusi," kata Irjen Kemenag RI, Dr H Faisal SE MSi CA CSEP di sela-sela meninjau langsung progres pembangunan PLHUT di Kankemenag



Faisal Irjen Kemenag RI (kedua dari kanan) bersama Kakanwil Kemenag DIY.

KR-Widiastuti

Kulonprogo, Sabtu Siang (21/1). Irjen dan Kakanwil Kemenag DIY ditemui Kasi PHU, Penyelenggara Zakat Wakaf, PPK, dan Pejabat Pengadaan Kankemenag Kulonprogo.

Apresiasi juga diberikan oleh Kakanwil Kemenag DIY, Dr H Masmin Afif MAg yang mendampingi Irjen.

"Untuk proses penghapusan gedung supaya dipercepat, sehingga proses pembangunan dapat segera dilaksanakan lebih awal. Perpindahan lokasi pelayanan sementara diharapkan agar tidak mengganggu kualitas pelayanan pada masyarakat," pesan Kakanwil. (Wid)

PDIP Ajak Gunungkidul Lawan Stunting



Penyerahan alat mainan dan tambahan makanan.

KR-Dedy EW

WONOSARI (KR) - Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta MY Esti Wijayati mengungkapkan, penanganan stunting perlu dukungan seluruh pemangku kepentingan pemerintah. Untuk mengatasi secara tuntas dan menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penanganan berkelanjutan. Gangguan pertumbuhan yang dialami anak akibat kekurangan gizi perlu penanganan khusus.

"PDI Perjuangan menaruh perhatian serius permasalahan stunting ini. Ketua umum Megawati Soekarnoputri mendorong kader di seluruh tanah air berperan aktif memperjuangkan kebutuhan asupan gizi bagi ibu hamil dan anak balita. Karena tahap tersebut menentukan kualitas kesehatan berkelanjutan setiap orang untuk mewujudkan

gagasan Bung Karno yang disebut Generasi Emas 2045," kata MY Esti Wijayati diacara kegiatan dapur umum di Balai Padukuhan Ngunut Kidul, Kelor, Karangmojo, Senin (23/1).

Kegiatan dihadiri Ketua DPC PDIP Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih SE, Penewu Karangmojo Marwatahadi MSi, Lurah Kelor Suratman, Perwakilan Kementerian Sosial, Puskesmas Karangmojo dan kader Kesehatan serta anak-anak di Kelor. Kegiatan dapur umum bertepatan HUT Ibu Megawati Soekarnoputri menyediakan kegiatan pengolahan bahan makanan bergizi berupa sayuran dan protein untuk ibu hamil, ibu menyusui, beserta anak balita. Berbagai bahan pokok makanan bergizi disipkan Tim Relawan Posko EW seperti pembagian makanan tambahan balita

berusia 6 sampai 59 bulan, makanan tambahan ibu hamil. Adapun pihak Puskesmas Karangmojo ikut berperan memberikan fasilitas pengecekan tensi dan gula darah gratis. Kelurahan Kelor sebagai tempat berlangsungnya kegiatan dapur umum relawan Posko EW PDI Perjuangan karena kasus balita mengalami gangguan stunting cukup tinggi.

Diungkapkan, kerja politik perlu menjangkau akar persoalan rakyat kecil dan menyangkut urusan dapur ekonomi rakyat. Terlebih stabilitas politik sangat ditentukan urusan dapur rakyat tercukupi yang akan keluar daya gerak rakyat mewujudkan kejayaan Indonesia Raya. "PDI perjuangan mengajak masyarakat bangkit melawan stunting dengan fokus pada pencegahan dan penanganan. Balita hari ini adalah Generasi Emas Tahun 2045 yang akan memasuki usia produktif, Memiliki tugasnya berat menjadi penggerak utama memajukan bangsa.

"Sehingga semua harus menaruh perhatian serius pada balita dan perjuangan membebaskan Indonesia dari stunting. Mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas," jelasnya. (Ded)

DATA RIIL KEKURANGAN PEGAWAI

Kebijakan Pusat Pemkab Dilarang Rekrut THL

WONOSARI (KR) - Pemkab Gunungkidul memastikan Tahun 2023 tidak ada rekrutmen Tenaga Harian Lepas (THL). Kebijakan tersebut sejalan dengan moratorium yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Iskandar mengatakan terkait dengan rekrutmen masih menunggu kebijakan dari Pusat.

"Kebijakan larangan merekrut THL hingga November 2023," katanya Senin (23/1).

Menurutnya, keberadaan THL saat sekarang ini sangat membantu. Pasalnya, jumlah pegawai

masih sangat kurang.

Berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja, idealnya di Gunungkidul membutuhkan 14.000 pegawai. Namun demikian, baru ada sekitar 6.900 orang, sehingga keberadaan THL sangat membantu untuk menutupi kekurangan pegawai. Meskipun tidak boleh merekrut THL tetapi yang sudah ada bisa diperpanjang apabila kerjanya dinilai baik.

Terkait dengan kekurangan pegawai, berharap ada kebijakan yang lebih leluasa berkaitan dengan penambahan pegawai.

Saat ini dari sisi kebijakan ada penambahan melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Tetapi perekrutan P3K hanya dikhususkan pemenuhan pelayanan dasar guru dan kesehatan. Adapun untuk tenaga administrasi hingga sekarang belum ada penambahan.

"Padahal setiap tahun yang pensiun dari tenaga administrasi juga banyak," ucapnya.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti

Kuntariningsih SE mengatakan, berkaitan dengan kekurangan pegawai di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pihaknya meminta kepada BKPPD agar melakukan analisa jabatan dan kajian untuk mengetahui kekurangan dan kebutuhan secara pasti pegawai yang dibutuhkan.

Menurut Endah, permasalahan tentang kepegawaian sudah dimasukkan dalam rekomendasi pengawasan DPRD di triwulan keempat 2022. "Sudah kami serahkan ke bupati dan harapannya bisa ditindaklanjuti secepatnya," terangnya. (Bmp)

PUNCAK ARUS BALIK LIBUR IMLEK 2023 DI YIA

Jumlah Penumpang Pesawat Capai 13.000

TEMON (KR) - Jumlah penumpang pesawat di Yogyakarta International Airport (YIA) di Kawasan Pesisir Selatan Kapanewon Temon, Kulonprogo mengalami kenaikan cukup signifikan pada masa libur Imlek 2023.

Pengelola mencatat jumlah penumpang datang dan berangkat berkisar 13 ribu penumpang dengan pergerakan pesawat sebanyak 88 pergerakan. Meningkatnya pengguna jasa penerbangan di YIA tidak lepas dari kelengkapan pemerintah saat ini.

Airport Operation Center Head YIA, Budi Wiyono membenarkan banyak warga memanfaatkan libur Imlek 2023 bepergian memilih transportasi udara. "Termasuk di Yogyakarta International



KR-Asrul Sani

Penumpang pesawat memadati YIA di Temon.

Airport. Kita bisa melihat pada puncak arus balik libur Imlek 2023, kedatangan penumpang di terminal keberangkatan dan kedatangan," katanya, Senin (23/1).

Lebih lanjut diungkapkan, pada Senin (23/1) jumlah penumpang datang berkisar 5.140 orang dan penumpang yang berangkat dari YIA ke berbagai bandara menca-

pai 6.924 penumpang. Pihaknya memprediksi angka tersebut akan terus bertambah hingga penerbangan akhir pada pukul 21.00 WIB.

"Untuk pergerakan pesawat jumlahnya berkisar 88 pergerakan," jelasnya menambahkan kenaikan jumlah penumpang saat ini prosentasenya naik sekitar 59 persen dibanding libur Imlek 2022 lalu.

"Demikian juga pergerakan pesawat pada libur Imlek 2023 naik 73 persen dibanding tahun lalu," tuturnya.

Penerbangan domestik masih didominasi ke Jakarta, Balikpapan dan Denpasar Bali atau sebaliknya. Sementara penerbangan internasional didominasi ke Singapura dan Malaysia.

Secara terpisah, salah satu penumpang pesawat dari Balikpapan, Mulyono mengatakan, dirinya sedang libur dan memilih pulang kampung ke Kebumen Jawa Tengah menggunakan pesawat. Karena lebih efektif dan cepat.

"Saya memesan tiket sudah dari jauh-jauh hari untuk mengantisipasi kenaikan harga tiket pesawat," ujarnya. (Ru)

DIMULAI TAHUN 2023

Pemkab Terapkan Sistem Kearsipan Digital

WONOSARI (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul tahun 2023 akan menerapkan sistem kearsipan digital dengan menggunakan aplikasi terbaru Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi).

Aplikasi ini diterapkan dalam rangka mewujudkan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan secara terpadu. Hal ini sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden RI No 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Bupati sudah meminta percepatan pelaksanaan sistem kearsipan digital ini," kata



KR-Endar Widodo

Susana audienasi dengan Sekda Gunungkidul Sri Suhartanta SIP Msi

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Gunungkidul Kisworo SPd MPd, Senin (23/1).

Akhir minggu lalu, Dispusip sudah melakukan audiensi dengan Sekda Gunungkidul Sri Suhartanta SIP Msi untuk pelaksanaan kearsipan digital tersebut. Tahapannya, segera membentuk Tim Helpdesk yang diambil dari Dinas

terkait diantaranya, dari Bagian Organisasi Sekda, Badan Keuangan dan Arsip Daerah (BKAD), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Inspektori Daerah (Irda). Dengan penerapan kearsipan digital ini agar,

mempercepat penerapan pemerintah berbasis elektronik, mempercepat koordinasi pengembangan e-government yang terintegrasi dan mempercepat penyatuan data (satudata) seluruh instansi pemerintah daerah. "Minggu ini akan disampaikan sosialisasi kepada 47 organisasi perangkat daerah (OPD)," tambahnya. (Ewi)

Alokasi Pupuk Subsidi Urea dan NPK Aman

WATES (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo memastikan alokasi pupuk subsidi jenis Urea dan NPK sepanjang 2023 di daerah ini aman. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) setempat Ir Aris Nugraha MMA menyebutkan alokasi pupuk Urea sebanyak 9.086,47 ton dan NPK 8.387 ton.

"Ketersediaan pupuk tahun ini lebih aman karena pemakaiannya sedikit," katanya, Minggu (23/1).

Diungkapkan kalau pada 2022 silam, khususnya September semua jenis tanaman boleh menggunakan pupuk bersubsidi maka pada Oktober - Desember sudah dibatasi hanya sembilan komoditas. Selain itu jenis subsidi juga dikurangi, pertama NPK.

"Untuk jenis NPK realisasi pada 2022 sebesar 7.762,5 ton dari alokasi 7.814 ton. Kemudian pada 2023, alokasi NPK di Kulonprogo meningkat 8.387 ton. Sementara alokasi Urea pada 2022, sebanyak 5.250 ton dan pada 2023 naik jadi 11.121 ton," jelasnya menambahkan pada 2023 alokasi pupuk bersubsidi hanya NPK dan Urea.

Adapun komoditas yang menggunakan pupuk bersubsidi hanya sembilang, yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, dan kakao.

"Sekarang petani melon atau semangka tidak boleh menggunakan pupuk bersubsidi. Termasuk pakan ternak sudah tidak bisa menggunakan pupuk bersubsidi," tegas Aris. Ketua Komisi II DPRD setempat

Yuliyantoro SE saat dimintai tanggapannya mengatakan, perlu adanya transparansi penjualan pupuk di kios pupuk. Mengingat adanya keluhan dari para petani terkait alokasi setiap petani tidak sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Ironisnya ada petani kesulitan mendapatkan pupuk di kios.

Dalam upaya mengatasi masalah tersebut perlu ada pemasangan papan pengumuman di setiap kios yang menerangkan perihal alokasi pupuk untuk kelompok dan data pupuk setiap petani.

"Langkah itu untuk transparansi penggunaan pupuk dan bisa mempermudah pengawasan," jelas politisi PDI Perjuangan tersebut. (Ru)